

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOREOGRAFI TARI
TRADISIONAL MINANGKABAU DI KOTA PAYAKUMBUH ATAS
TINDAKAN PLAGIAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 37/PK-I/II/2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOREOGRAFI TARI
TRADISIONAL MINANGKABAU DI KOTA PAYAKUMBUH ATAS
TINDAKAN PLAGIAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

(Nabila Seppika Haffil, 1910111028, Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum., Shafira Hijriya, S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau berupaya mengembangkan tari tradisional dengan cara membentuk koreografi sendiri untuk tarian daerah yang sudah ada sehingga bentuk koreografi pencipta satu dengan pencipta lainnya memilih perbedaan namun tetap sesuai dengan adat yang ada. Pengembangan koreografi tersebut ternyata menimbulkan orang yang tidak kreatif, berusaha mengambil karya orang lain kemudian mengaku bahwa karya tersebut milik mereka. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas karya seni tari tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh? (2) Apa yang menjadi kendala perlindungan hukum karya hak cipta tari tradisional Minangkabau di Kota Payakumbuh atas tindakan plagiat?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan dapat dibagi menjadi 2 diantaranya preventif yaitu memberikan hak kepada pencipta untuk melindungi karyanya dari segala tindakan pelanggaran (pasal 5 UUHC), memberikan kebebasan kepada pencipta untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karyanya (pasal 64 ayat 2 UUHC), memberikan gambaran penting atas pendaftaran hak cipta, dan mencatumkan bentuk larangan atau pelanggaran hak cipta (pasal 43 UUHC). Sedangkan perlindungan represifnya yaitu dinyatakan adanya sanksi denda kerugian yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Kemenkumham menyediakan PPNS untuk mengarahkan pencipta dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta. 2) perlindungan karya cipta atas tindakan plagiarisme yakni kurangnya kesadaran dan keaktifan pencipta untuk mencari tahu seberapa penting pencatatan hak cipta. Informasi yang dibagikan secara online pun masih menjadi kendala tersendiri bagi pencipta dikalangan sudah berumur. Pencipta pun enggan untuk melakukan pelaporan akan tindakan plagiarisme dengan alasan biaya dan merasa membuang waktu atau takut dengan alasan belum mendaftarkan hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak Cipta, Plagiarisme